



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);

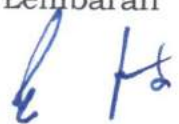
6 K

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).

11



16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp2.109.367.890.000,00 bertambah sejumlah Rp112.308.846.000,00 sehingga menjadi Rp2.221.676.736.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
  - a. Semula Rp2.057.234.747.000,00
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp 39.300.414.000,00
  - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp2.096.535.161.000,00
2. Belanja
  - a. Semula Rp2.101.281.890.000,00
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp 111.308.846.000,00
  - Jumlah belanja setelah Perubahan Rp2.212.590.736.000,00
  - Defisit setelah perubahan Rp (116.055.575.000,00)
3. Pembiayaan
  - a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp 52.133.143.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 73.008.432.000,00
    - Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 125.141.575.000,00





b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	8.086.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	9.086.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	116.055.575.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran Setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Ia, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 22 Agustus 2019  
BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 22 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN PURBALINGGA,

  
WAHYU KONTARDI



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA									
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN									
TAHUN ANGGARAN 2019									
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%				
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7			
4	PENDAPATAN								
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH								
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah								
4.1.1.01	Pajak Hotel	2.057.234.747.000,00	2.096.535.161.000,00	39.300.414.000,00	1,91				
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	266.840.260.000,00	282.795.073.000,00	15.954.813.000,00	5,98				
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	50.680.000.000,00	54.640.525.000,00	3.960.525.000,00	7,81				
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	350.000.000,00	335.698.000,00	(14.302.000,00)	(4,09)				
4.1.1.01.11	Pajak Hotel / Cottage	40.000.000,00	33.533.000,00	(6.467.000,00)	(16,17)				Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	70.114.000,00	70.114.000,00	0,00	0,00				Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
		17.068.000,00	17.068.000,00	0,00	0,00				Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
		216.366.000,00	208.531.000,00	(7.835.000,00)	(3,62)				Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
		6.452.000,00	6.452.000,00	0,00	0,00				Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.02	Pajak Restoran	3.500.000.000,00	4.525.350.000,00	1.025.350.000,00	29,30				
4.1.1.02.01	Restoran	875.000.000,00	950.000.000,00	75.000.000,00	8,57				Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.02.02	Rumah Makan	105.350.000,00	105.350.000,00	0,00	0,00				Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.02.05	Katering	2.399.650.000,00	3.350.000.000,00	950.350.000,00	39,60				Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.02.06	Warung	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00				Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.03	Pajak Hiburan	2.815.000.000,00	3.076.477.000,00	261.477.000,00	9,29				
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	45.000.000,00	38.177.000,00	(6.823.000,00)	(15,16)				Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	5.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	60,00				Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	2.750.000.000,00	3.025.000.000,00	275.000.000,00	10,00				
4.1.1.03.19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	15.000.000,00	5.300.000,00	(9.700.000,00)	(64,67)				Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.04	Pajak Reklame	700.000.000,00	763.000.000,00	63.000.000,00	9,00				
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	629.000.000,00	660.000.000,00	31.000.000,00	4,93				Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.04.02	Reklame Kain	68.000.000,00	100.000.000,00	32.000.000,00	47,06				Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00				Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	20.000.000.000,00	21.000.000.000,00	1.000.000.000,00	5,00				
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	20.000.000.000,00	21.000.000.000,00	1.000.000.000,00	5,00				Perda Nomor 1 Tahun 2011



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019						
URUSAN Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.01 Sub Unit Organisasi : 1.01.01.001		URUSAN Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
1	2	3	4	(Rp)	%	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5	BELANJA	584.697.249.000,00	604.989.022.000,00	20.291.773.000,00	3,47	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	430.925.668.000,00	445.038.880.000,00	14.113.212.000,00	3,28	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	430.925.668.000,00	445.038.880.000,00	14.113.212.000,00	3,28	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	423.644.793.000,00	438.390.080.000,00	14.745.287.000,00	3,48	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	193.204.180.000,00	192.300.669.000,00	(903.511.000,00)	(0,47)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	16.591.084.000,00	16.272.773.000,00	(318.311.000,00)	(1,92)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	234.150.000,00	205.850.000,00	(28.300.000,00)	(12,09)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	15.861.857.000,00	15.360.203.000,00	(501.654.000,00)	(3,16)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	931.544.000,00	1.302.451.000,00	370.907.000,00	39,82	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	7.730.172.000,00	7.726.442.000,00	(3.730.000,00)	(0,05)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	865.301.000,00	1.199.551.000,00	334.250.000,00	38,63	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	2.647.000,00	3.398.000,00	751.000,00	28,37	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	5.193.996.000,00	5.161.382.000,00	(32.614.000,00)	(0,63)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Iuran Jaminan Kematian	1.144.172.000,00	1.137.963.000,00	(6.209.000,00)	(0,54)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	381.395.000,00	379.249.000,00	(2.146.000,00)	(0,56)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Tunjangan Profesi Guru PNSD	181.135.782.000,00	196.540.149.000,00	15.404.367.000,00	8,50	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.24	Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi	368.513.000,00	800.000.000,00	431.487.000,00	117,09	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	7.280.875.000,00	6.648.800.000,00	(632.075.000,00)	(8,68)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	7.280.875.000,00	6.634.000.000,00	(646.875.000,00)	(8,88)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	0,00	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	153.771.581.000,00	159.950.142.000,00	6.178.561.000,00	4,02	



JAWABAN  
 7. JAWABAN  
 8. JAWABAN

No	Uraian	Kategori	Kode	Jumlah	Nilai	Total
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO / KODE	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	4	
5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		243.200.000	243.200.000	-
5.1.4.01.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		243.200.000	243.200.000	-
1	Kodim	Purbalingga	30.000.000	30.000.000	-
2	Polres Purbalingga	Jl. Mayjen Soengkono Purbalingga	183.200.000	183.200.000	-
3	Lanud Jenderal Besar Soedirman	Desa Wirasaba, Purbalingga	30.000.000	30.000.000	-
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi		10.912.500.000	14.601.200.000	3.688.700.000
5.1.4.05.04	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan		2.432.500.000	3.690.000.000	1.257.500.000
1	Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purbalingga	Purbalingga	137.500.000	150.000.000	12.500.000
2	BAZNAS Kabupaten Purbalingga	Purbalingga	75.000.000	100.000.000	25.000.000
3	IPHI	Purbalingga	100.000.000	100.000.000	-
4	Lazis NU	Purbalingga	75.000.000	75.000.000	-
5	Lazis MU	Purbalingga	75.000.000	75.000.000	-
6	Baitul Muslimin	Purbalingga	50.000.000	50.000.000	-
7	BKSAG	Purbalingga	25.000.000	25.000.000	-
8	Masjid Al ikhlas Desa Kalapacung, Bobotsari	Bobotsari	10.000.000	10.000.000	-
9	Masjid Al-Iman Desa Limbasari Kec. Bobotsari	Bobotsari	20.000.000	20.000.000	-
10	TPQ Al-Falah Ali Musyni Perumahan Puri Bobotsari Kec. Bobotsari	Bobotsari	10.000.000	10.000.000	-
11	Masjid Baeturohim RT 13 RW 06 Desa Pagedangan Kec. Bojongsari	Bojongsari	15.000.000	15.000.000	-
12	Masjid Baitul Muttaqiem Desa Pagedangan, Bojongsari	Bojongsari	10.000.000	10.000.000	-
13	Masjid Baitur Rohman RT 13 RW 07 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari	Bojongsari	15.000.000	15.000.000	-
14	Masjid Baiturrokhman RT 01 RW 08 Desa Patemon Kec. Bojongsari	Bojongsari	15.000.000	15.000.000	-
15	Masjid Jami Baitul A'ala RT 01 RW 11 Desa Bojongsari Kec. Bojongsari	Bojongsari	15.000.000	15.000.000	-
16	Masjid Nur Hidayah RT 18 RW 08 Desa Beji Kec. Bojongsari	Bojongsari	15.000.000	15.000.000	-
17	Masjid Nurul Huda RT 02/01 Desa Bumisari Kec. Bojongsari	Bojongsari		15.000.000	15.000.000
18	Masjid Nurul Iman Desa Pekalongan Kec. Bojongsari	Bojongsari	20.000.000	20.000.000	-
19	Mushola Al Ikhlas Dusun III RT 01 RW 06 Desa Bojongsari Kec. Bojongsari	Bojongsari	-	-	-
20	Mushola Al Ikhlas RT 06 RW 03 Desa Beji Kec. Bojongsari	Bojongsari	20.000.000	20.000.000	-
21	Mushola Al Ikhlas RT 14 RW 07 Desa Banjaran Kec. Bojongsari	Bojongsari	15.000.000	15.000.000	-
	TPQ Tanbihul Ghofilin Desa Kajongan Kec. Bojongsari	Bojongsari	-	40.000.000	40.000.000
22	Masjid Al Ikhlas Lanud JB Soedirman Ds Wirasaba, Bukateja	Bukateja	50.000.000	50.000.000	-





LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 70 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO / KODE	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	5	5	5
<b>5.1.5.01</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan</b>		<b>2.400.000.000</b>	<b>2.590.000.000</b>	<b>190.000.000</b>
<b>5.1.5.01.02</b>	<b>Belanja Bantuan Pamsimas</b>		<b>1.980.000.000</b>	<b>1.980.000.000</b>	-
1	Sharing Pamsimas Regulaer	Purbalingga	980.000.000	980.000.000	-
2	Stimulan sambungan rumah	Purbalingga	1.000.000.000	1.000.000.000	-
<b>5.1.5.01.07</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan/Panti Wreda</b>		<b>420.000.000</b>	<b>610.000.000</b>	<b>190.000.000</b>
1	Panti Asuhan Mandanasiwi Penambongan	Jl. Wiramenggala Kel. Penambongan Purbalingga	20.000.000	20.000.000	-
2	Panti Asuhan Daarul Istiqomah Babakan	Desa Babakan Kec. Kalimanah	20.000.000	20.000.000	-
3	Panti Asuhan Muhammadiyah Bukateja	Desa Bukateja Kec. Bukateja	20.000.000	20.000.000	-
4	Panti Asuhan Nadhief Senon	Desa Senon Kec. Kemangkong	20.000.000	20.000.000	-
5	Panti Asuhan Muhammadiyah Bobotsari	Desa Bobotsari Kec. Bobotsari	20.000.000	20.000.000	-
6	Panti Asuhan Al Mujahadah Pagerandong	Desa Pagerandong Kec. Mrebet	20.000.000	20.000.000	-
7	Panti Asuhan Yusufiyah Cipawon	Desa Cipawon Kec. Bukateja	20.000.000	20.000.000	-
8	Panti Asuhan Al Khoerot Majasari	Desa Majasari kec. Bukateja	20.000.000	20.000.000	-
9	Panti Asuhan Nurul Huda Karangreja	Desa Karangreja Kec. Kutasari	20.000.000	20.000.000	-
10	Panti Asuhan Darul Hadlonah Karangsantul	Kel.Karangsantul Kec.Padamara	20.000.000	20.000.000	-
11	Panti Asuhan Raudlatut Taqwa Penambongan	Kel.Penambongan Kec.Purbalingga	20.000.000	20.000.000	-
12	Panti Asuhan Mamba'ul Ikhsan Karangpucung	Desa Karangpucung Kec.Kertanegara	20.000.000	20.000.000	-
13	Panti Asuhan Muhammadiyah Palumutan	Desa Palumutan Kecamatan Kemangkong	20.000.000	20.000.000	-
14	Panti Asuhan Al Husna Patemon	Desa Patemon Kecamatan Bojongsari	20.000.000	20.000.000	-
15	Panti Asuhan Nurul Barokah Beji	Desa Bejo Kecamatan Bojongsari	20.000.000	20.000.000	-
16	Panti Asuhan Ar Rokhman Kalikabong	Kel. Kalikabong Kecamatan Kalimanah	20.000.000	20.000.000	-
17	Panti Rehabilitasi Nurul Ikhsan Karangsari	Desa Karangsari Kec.Kalimanah	20.000.000	20.000.000	-
18	Panti Rehabilitasi An Nur Bungkanel	Desa Bungkanel Kec.Karanganyar	20.000.000	20.000.000	-
19	Panti Rehabilitasi Rumah Terang Purbalingga Wetan	Kel. Purbalingga Wetan Kecamatan	20.000.000	20.000.000	-
20	Panti Wreda Dharma Kasih Kalimanah	Kec.Kalimanah	20.000.000	20.000.000	-
21	Panti Asuhan Rumah Asuh Putri Al Inayah Dusun Pasren Desa Bajong	Desa Bajong Kecamatan Bukateja	20.000.000	20.000.000	-



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	5.341.957.000,00	5.341.957.000,00	0,00	
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	52.133.143.000,00	112.352.336.000,00	60.219.193.000,00	115,51	
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	10.000.000.000,00	43.980.712.000,00	33.980.712.000,00	339,81	
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	37.300.000.000,00	38.321.096.000,00	1.021.096.000,00	2,74	
6.1.1.04.04	Belanja Modal	4.833.143.000,00	24.526.871.000,00	19.693.728.000,00	407,47	
6.1.1.04.07	Belanja Hibah	0,00	1.142.497.000,00	1.142.497.000,00	0,00	
6.1.1.04.08	Belanja Bantuan Sosial	0,00	516.200.000,00	516.200.000,00	0,00	
6.1.1.04.10	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	1.938.587.000,00	1.938.587.000,00	0,00	
6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	0,00	1.926.373.000,00	1.926.373.000,00	0,00	
6.1.5	<b>Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.01.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	8.086.000.000,00	9.086.000.000,00	1.000.000.000,00	12,37	
6.2.2	<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>	8.086.000.000,00	9.086.000.000,00	1.000.000.000,00	12,37	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	8.086.000.000,00	9.086.000.000,00	1.000.000.000,00	12,37	
6.2.2.02.05	PDAM	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 5 Tahun 2015
6.2.2.02.06	PT Bank Jateng	2.486.000.000,00	2.486.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 5 Tahun 2015
6.2.2.02.08	PD Owabong	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	Perda Nomor 5 Tahun 2015
6.2.2.02.10	PD BPR Artha Perwira	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 5 Tahun 2015
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		44.047.143.000,00	116.055.575.000,00	72.008.432.000,00	163,48	
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 22 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

WAHNU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 70

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 15.23 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.158.126.000,00)	(13.051.866.000,00)	(893.740.000,00)	7,35	

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 22 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 70

BUPATI PURBALINGGA,

KADYAH HAYUNING PRATIWI



NO / KODE	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	4	
	Kelompok Tani Ternak sapi SIDO MULYO Desa Nangkod Kecamatan Kejobong	Kejobong	-	35.000.000	35.000.000
<b>5.1.4.08</b>	<b>Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>		-	<b>190.000.000</b>	<b>190.000.000</b>
5.1.4.08.01	Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kabupaten		-	150.000.000	150.000.000
5.1.4.08.02	Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Bawaslu Kabupaten	Purbalingga	-	40.000.000	40.000.000
<b>5.1.4.09</b>	<b>Belanja Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta</b>		<b>10.756.800.000</b>	<b>10.759.800.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>5.1.4.09.01</b>	<b>Belanja Hibah BOP PAUD Swasta</b>		<b>10.756.800.000</b>	<b>10.759.800.000</b>	<b>3.000.000</b>
1	PAUD swasta	Purbalingga	10.756.800.000	10.759.800.000	3.000.000
<b>5.1.4.10</b>	<b>Belanja Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan</b>		-	<b>1.995.700.000</b>	<b>1.995.700.000</b>
<b>5.1.4.10.01</b>	<b>Belanja Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan</b>		-	<b>1.995.700.000</b>	<b>1.995.700.000</b>
1	PKBM Al Furqon Kec. Bobotsari	Bobotsari	-	342.000.000	342.000.000
2	PKBM Maju Lestari Kec. Bojongsari	Bojongsari	-	162.000.000	162.000.000
	PKBM Sentosa Kec. Bukateja	Bukateja	-	87.000.000	87.000.000
	PKBM Bina Bangsa Kec. Kaligondang	Kaligondang	-	202.500.000	202.500.000
	PKBM Resi Bisma Kec. Kalimanah	Kalimanah	-	62.000.000	62.000.000
	PKBM Al Ridlo Kec. Karangjambu	Karangjambu	-	178.200.000	178.200.000
	PKBM Bina Mandiri Kec. Karangmoncol	Karangmoncol	-	156.500.000	156.500.000
	PKBM Karya Manunggal Kec. Kejobong	Kemangkon	-	108.000.000	108.000.000
	PKBM Satria Negara Kec. Kertanegara	Kertanegara	-	216.000.000	216.000.000
	PKBM Taruna Maju Kec. Kutasari	Kutasari	-	19.500.000	19.500.000
	PKBM Cakra Kec. Mrebet	Mrebet	-	192.000.000	192.000.000
	PKBM Karya Utama Kec. Padamara	Padamara	-	180.000.000	180.000.000
	PKBM Ubaya Mukti Kec. Purbalingga	Purbalingga	-	90.000.000	90.000.000
<b>JUMLAH BELANJA HIBAH</b>			<b>21.912.500.000</b>	<b>27.789.900.000</b>	<b>5.877.400.000</b>



BUPATI PURBALINGGA,

*[Signature]*

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 22 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA



*[Signature]*

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 70

NO / KODE	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	5	5	5
22	Panti Asuhan Muhammadiyah Kertanegara	Kecamatan Kertanegara	-	150.000.000	150.000.000
23	Panti Asuhan Muhammadiyah Kertanegara	Kecamatan Kertanegara	-	20.000.000	20.000.000
24	Panti Asuhan Anak Yayasan Boas Suwon Korea Selatan Grecol	Desa Grecol Kecamatan Kalimanah	-	20.000.000	20.000.000
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat		22.298.500.000	24.713.500.000	2.415.000.000
5.1.5.03.03	Belanja Beasiswa Kurang Mampu		1.500.000.000	1.500.000.000	-
1	Beasiswa Miskin	Purbalingga	1.500.000.000	1.500.000.000	-
5.1.5.03.05	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat		1.778.500.000	1.778.500.000	-
1	Bansos kepada masyarakat	Purbalingga	536.500.000	536.500.000	-
2	Bantuan orang dengan kecacatan berat	Purbalingga	1.080.000.000	1.080.000.000	-
3	Bansos thalasemia	Purbalingga	162.000.000	162.000.000	-
5.1.5.03.06	Belanja Bantuan Sosial kepada Anak Yatim Platu		1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	Bantuan anak yatim piatu	Purbalingga	1.000.000.000	1.000.000.000	-
5.1.5.03.09	Belanja Bantuan Sosial kepada PPCI		20.000.000	20.000.000	-
1	PPCI	Kab.Purbalingga	20.000.000	20.000.000	-
5.1.5.03.10	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin		18.000.000.000	18.000.000.000	-
1	Bantuan Rehab RTLH	Kab.Purbalingga	18.000.000.000	18.000.000.000	-
5.1.5.03.11	Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK)		-	2.415.000.000	2.415.000.000
1	Bantuan Rehab RTLH	Kab.Purbalingga	-	2.415.000.000	2.415.000.000
JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL			24.698.500.000	27.303.500.000	2.605.000.000

BUPAT PURBALINGGA,  
  
 DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
 pada tanggal 22 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA

WAHYU KONTARDI  
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 70